



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN;
2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
di tempat

Jakarta, 8 September 2005

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 06 /MBU/2005

Sehubungan dengan banyaknya usaha penipuan melalui SMS dan melalui cara-cara lain yang ditujukan kepada Direksi BUMN akhir-akhir ini yang mengatasnamakan baik langsung maupun tidak langsung atau seolah-olah bertindak sebagai pejabat Kementerian Negara BUMN, dengan ini kami meminta perhatian kepada para anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN serta pihak-pihak lainnya agar tidak melayani permintaan-permintaan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anggota-anggota Direksi BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Kementerian Negara BUMN, seperti para pejabat BUMN setingkat di bawah Direksi dan para calon anggota Direksi yang sedang dalam proses *fit and proper test*, telah sering dan akan selalu berpotensi untuk dijadikan objek penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Surat-surat edaran dari Kementerian Negara BUMN seperti ini telah berulang kali disampaikan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, maupun kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Negara BUMN, yaitu melalui Surat Edaran Nomor : SE-03/MBU/2004 tanggal 27 Oktober 2004 dan surat Nomor : S-95/MBU/2005 tanggal 2 Maret 2005, Nomor S-154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005, dan Nomor S-168/S.MBU/2005 tanggal 11 Mei 2005, namun upaya-upaya penipuan nampaknya tidak pernah surut dan dikhawatirkan masih ada yang menjadi korban penipuan tersebut.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seorang anggota Direksi yang dipercaya sebagai pengurus dan mewakili perusahaan, dituntut untuk bertindak dengan penuh kecakapan, kecerdasan, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, apabila masih terdapat anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang menjadi korban penipuan, maka hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kami dalam melakukan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SUGIHARTO

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;